



# Buletin Parlementaria

Nomor 1100/III/IV/2020 • April 2020

## Bantu Pemerintah, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19



9 772614 339005



**7** Batasi Penyebaran  
Covid-19, Larangan  
Mudik Harus Segera  
Diumumkan



**22** Pemerintah Didorong  
Perbaiki Draft  
RUU Ciptaker

# Bantu Pemerintah, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

Untuk membantu Pemerintah dalam mempercepat penanganan virus Corona (Covid-19) di tiap-tiap daerah, DPR RI berinisiatif membentuk Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 secara lintas partai dan bertanggung jawab kepada Ketua DPR RI. Adapun tujuan dari dibentuknya Satgas tersebut adalah untuk menyambungkan pengusaha lokal atau donatur lokal dalam membantu memenuhi kebutuhan rumah sakit atau puskesmas.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad yang juga bertindak selaku Koordinator Satgas Lawan Covid-19 saat *launching* Satgas Lawan Covid-19 DPR RI di Media Center DPR RI, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4).

“Mekanisme kerja dari satgas ini dilakukan melalui aplikasi/*website* **SatgasLawanCovid19.com**, yang nantinya terkoneksi dengan 682 rumah sakit rujukan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah secara resmi, serta puskesmas-puskesmas. Apabila membutuhkan alat kesehatan bisa mengisi *form* di sana yang terintegrasi dengan aplikasi Kementerian Kesehatan untuk kebutuhan tiga bulan ke depan,” ucap Dasco.

Dalam *launching* yang turut dihadiri Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani secara virtual, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin beserta Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR RI secara langsung itu, Dasco menambahkan, *website* tersebut akan terintegrasi langsung dengan aplikasi dari Kementerian Kesehatan. Hal itu dimaksudkan agar memudahkan kontrol terhadap alat



Satgas Lawan Covid-19 DPR RI akan membantu Pemerintah mempercepat penanganan Covid-19. Foto: Gerald/IMAN

kehatan yang telah dipenuhi.

“Kemudian tim Satgas akan bekerja sama dengan para pengusaha lokal atau donatur lokal yang dapat masuk ke *website* untuk melihat kebutuhan rumah sakit rujukan dan puskesmas-puskesmas yang berdomisili di tempat pengusaha atau donatur lokal tersebut. Kerja satgas ini juga dalam upaya untuk memutus atau *by pass* mata rantai birokrasi agar bantuan dan dukungan dapat tepat langsung ke sasaran,” jelas Dasco.

Sebagai catatan, sambung politisi Partai Gerindra itu, Satgas Lawan Covid-19 ini tidak menerima sumbangan dalam bentuk uang. Tetapi sumbangan dalam bentuk alat kesehatan, masker, Alat Pelindung Diri (APD), ventilator serta alat pendukung medis lainnya, yang akan langsung

didistribusi ke rumah sakit-rumah sakit rujukan dan puskesmas-puskesmas yang ada. Lebih lanjut Dasco memastikan, pendistribusiannya akan dipantau oleh Satgas Lawan Covid-19 melalui satuan-satuan kerja Satgas Daerah Lawan Covid-19.

“Satgas Lawan Covid-19 ini akan berkoordinasi dan berkerja sama dengan instansi terkait khususnya Kementerian Kesehatan RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kami mohon doa agar kami dapat bekerja dengan baik untuk membantu Pemerintah dalam rangka menuntaskan dan melawan Covid-19,” pungkas Dasco. Sementara itu, Puan menyampaikan bahwa Satgas Lawan Covid-19 ini akan membantu Pemerintah dalam mempercepat penanganan Covid-19 dan memenuhi kebutuhan RS rujukan. ■ dep/es/sf

# Serahkan Bantuan PCR, Ketua DPR Ingin Tes Covid-19 Makin Cepat dan Akurat

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyerahkan bantuan 1 unit mesin PCR serta 21 Box Detection Kit For 2019-nCov kepada Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) sebagai bentuk komitmennya membantu percepatan tes virus Corona (Covid-19). Puan menyatakan tes massal dan cepat namun akurat sangat dibutuhkan, untuk mencegah penularan pasien positif Covid-19 ke orang lain.

Bantuan mesin tes Covid-19 dari Puan ini diserahkan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Utut Adianto di Lab Mikrobiologi UI, Jakarta Pusat, Selasa (14/4). Bantuan diterima Wakil Dekan FKUI Bidang Pendidikan Penelitian dan Kemahasiswaan Prof. dr. Dwiana Ocviyanti, SpOG(K), MPH. "Makin dini kita mengetahui seseorang terpapar virus Corona, makin mudah kita melakukan tindakan pencegahan untuk memutus rantai penularan. Karena itu, ketersediaan alat tes spesimen sangat dibutuhkan," pesan Puan.

Dalam sambutan tertulisnya, Puan menyatakan sejak awal DPR RI telah mengimbau bahwa tes Covid-19 harus dilakukan secara masif dan proporsional sampelnya, mengingat jumlah total penduduk Indonesia yang mencapai 260 juta orang lebih. Menurut Puan, semakin cepat dan semakin banyak hasil tes Covid-19 yang dapat dideteksi, maka semakin kuat kualitas data untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan kesehatan yang tepat atau efektif.

Politisi PDI-Perjuangan ini berharap bantuannya dapat digunakan untuk menunjang dan mempercepat kegiatan FKUI dalam mendeteksi hasil-hasil tes pemeriksaan Covid-19. "Indonesia memiliki ahli-ahli kesehatan seperti di FKUI yang pengetahuannya sangat mumpuni, yang harus kita dukung dengan bantuan alat-alat yang memadai," ujar Puan. Departemen Mikrobiologi UI mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan Ketua DPR RI Puan Maharani. ■ **tn/sf**



Bantuan mesin tes Covid-19 dari Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani diserahkan Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI Utut Adianto di Lab Mikrobiologi UI, Jakarta Pusat. Foto: Ist/MIAN



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI

**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapani, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)

**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

**W.K PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

**REDAKTUR**  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

**REDAKTUR FOTO**  
M. Andri Nurdiansyah

**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Hasri Mentari

**ANGGOTA REDAKSI**  
Rizka Arinindy, S.Sos. Erlangga Panji Samudro, S.Ikom.  
Alfi Widoretno, S.I.Kom, Natasya Amanda P. S.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Purntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Riyan Hidayat, Nafisa Hanum Alaydrus, Larissa Amanda Indianti, Mohammad Rizki Nugraha.

**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie.

**ANALIS MEDIA**  
Deprisa Citra Akbari, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoywati

**INFOGRAFIS**  
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natallo, Fajar Suryanto

**ADMINISTRASI**  
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher

**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Sartomo, S.S., M.Si (Kabag Penerbitan)

**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah, Fathurahman

**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito

**FOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen

**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Sugiyanto, S.E, Yudi Kresna

**ADMINISTRASI**  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN**  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

# Gerak Cepat DPR Awasi Tugas Pemerintah Bantu Masyarakat Hadapi Covid-19

**D**PR RI membentuk Tim Pengawasan (Timwas) Covid-19 dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa saat ini DPR RI telah membentuk Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Dikatakannya, tim yang anggotanya berasal dari seluruh Fraksi dan Komisi ini diketuai langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang

Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Muhaimin Iskandar.

“Tim dibentuk untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 yang dilaksanakan pemerintah dari aspek regulasi, kelembagaan, dan mitigasi bencana dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran,” ucap Muhaimin dalam keterangan persnya yang diterima **Parlementaria**, Kamis (9/4).

Timwas Covid-19 akan fokus pada pengawasan terhadap tugas Pemerintah dalam menyiapkan masyarakat agar tangguh menghadapi Covid-19, tambahnya. Di samping itu, juga untuk mengawasi agar ketersediaan logistik seperti masker, Alat Pelindung Diri (APD), dan obat-obat terdistribusi dengan baik. “Dalam situasi kedaruratan, tim akan

melakukan pengawasan penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 agar cepat dan efektif memenuhi kebutuhan *emergency*,” tutur Muhaimin lebih lanjut.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, tim tersebut akan segera melakukan rapat dengan Gugus Tugas Covid-19 dan jajarannya, untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sudah tepat dan terkoordinasikan antar kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah. Tim juga akan mengadakan pertemuan dengan para gubernur, bupati dan wali kota yang daerahnya menjadi zona merah Covid-19.

Ia juga menyampaikan, ada beberapa temuan awal yang perlu segera diatasi, diantaranya yaitu mengenai koordinasi di antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah perlu ditingkatkan, untuk mesinkronkan berbagai data, rencana program kegiatan dari kementerian dan lembaga untuk menghindari adanya tumpang tindih program/kegiatan; distribusi Alat Pelindung Diri (APD) untuk rumah sakit, khususnya rumah sakit swasta masih belum optimal, sehingga masih banyak rumah sakit yang belum mendapat APD yang standar.

“Selain itu juga terkait antisipasi terhadap lambannya proses pencairan dana, karena menggunakan sistem dan prosedur yang normal, sehingga menghambat proses penanganan Covid-19. Dan perlu adanya antisipasi terhadap dampak sosial pandemi Covid-19 seperti banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan, kehilangan pekerjaan, dan potensi munculnya tindak kriminalitas, dan dampak lainnya,” pungkasnya. ■ dep/es/sf

Wakil Ketua DPR RI  
Abdul Muhaimin Iskandar.  
Foto: Jaka/MAN



# Satgas Lawan Covid-19 Beri Bantuan Obat dan APD



Satgas Lawan Covid-19 dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan bantuan obat-obatan dan APD kepada RSD Wisma Atlet. Foto: Yoga/MAN

**S**atgas Lawan Covid-19 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan sejumlah bantuan obat-obatan herbal, Alat Pelindung Diri (APD) beserta kelengkapan dan buku panduan penanganan virus Corona (Covid-19) kepada pasien yang dirawat dan petugas kesehatan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Bantuan berupa obat herbal tersebut berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh pasien Covid-19.

“(Bantuan) Satgas lawan Covid-19 ada kami bawa, yang pertama buku panduan penanganan waktu terjadi

(Covid-19), obat-obatan herbal dan obat botol untuk 1500 pasien,” ujar Dasco kepada awak media usai penyerahan bantuan, Selasa (14/4). Turut serta Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin beserta sejumlah Anggota Anggota DPR RI yang tergabung pada Satgas Lawan Covid-19 DPR RI.

Sebelum menyerahkan bantuan, Satgas Lawan Covid-19 DPR RI telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, serta Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono, sebagai Penglima Kogasgabpad RS Darurat Wisma Atlet. Berdasarkan informasi

yang Satgas terima, ada 368 pasien positif Covid-19 di Wisma Atlet Kemayoran. Sementara, 127 pasien kategori PDP, dan 47 pasien ODP.

Wakil Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) ini menjelaskan, bantuan obat herbal tersebut dalam rangka membantu Pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik di pusat maupun daerah. DPR RI memandang perlu melakukan langkah-langkah strategis dengan membentuk Satgas Lawan Covid-19 yang terdiri dari Anggota DPR RI lintas partai dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua DPR RI. ■ eko/sf

# Azis Syamsuddin Bahas Stabilitas Ekonomi dengan APINDO, KADIN, dan HIPMI



Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin. Foto: Mario/MAN

**W**akil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menggelar konferensi secara virtual, guna membahas peran Parlemen dalam menjaga stabilitas hukum dan *sustainability* ekonomi serta solusi perusahaan dalam menyikapi krisis Covid-19. Agenda bertajuk “Ngobrol Santai” tersebut juga dihadiri oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Sukamdani, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan Roeslani, Ketua Umum HIPMI Mardani Maming, Mantan Dirut BEI Tito Soelistiyiyo, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, serta sejumlah pemimpin redaksi media nasional.

Secara garis besar, para narasumber tersebut melaporkan kepada Azis mengenai kondisi sektor riil dari sudut pandang pelaku usaha. Hasilnya, hampir semua sektor ekonomi mengalami pukulan mendalam dengan kemampuan bertahan hanya sampai tiga hingga lima bulan ke depan. Berdasarkan data APINDO, terdapat rata-rata penurunan produksi dan aktivitas perusahaan swasta sebanyak 30-90 persen. Untuk itu para pengusaha sangat menggantungkan asanya pada stimulus yang akan digelontorkan oleh Pemerintah.

Menanggapi hal tersebut, Azis menyampaikan upaya Pemerintah dalam meminimalisir dampak wabah virus Covid-19, khususnya di bidang ekonomi dan investasi, telah tercermin dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, yang telah diserahkan pada awal bulan ini ke DPR RI. Meski belum disetujui, politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai aturan tersebut masih harus dilakukan sejumlah pembahasan melalui Rapat Pimpinan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang secepatnya akan diselenggarakan.

“Saya coba membuat kisi-kisi dari Perppu tersebut, yang mana sudah merupakan kompilasi dari apa yang sudah dilakukan, tetapi pembahasannya masih akan melalui Rapim dengan 5 Pimpinan DPR, baru selanjutnya akan kita bawa pada rapat Bamus yang terdiri dari ketua-ketua fraksi, yang akan melakukan pembahasan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apa yang disampaikan oleh sahabat-sahabat semua sudah tertuang dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Dan berkenaan dengan stimulus terdapat

dalam Pasal 16 tentang Kewenangan BI untuk menjamin likuiditas dan membeli repo surat berharga negara, berdasarkan rekomendasi LPS tentunya,” kata Azis di ruang kerjanya, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).

Ketua KADIN Indonesia Roslan Roeslani menyarankan semua pihak untuk mengantisipasi dampak yang terjadi usai wabah Covid-19 berakhir. Ia menuturkan, para investor di dunia saat ini memang masih dalam status *wait and see* dalam berinvestasi. Selain itu, besaran *capital outflow* yang terjadi selama masa pandemi berlangsung sangat signifikan. Ia juga melihat upaya melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja sebagai antisipasi dan respons terhadap kondisi ekonomi saat ini. Menurutnya, iklim investasi di Indonesia masih berpotensi, karena fundamental ekonomi yang cukup stabil sebelum adanya Covid-19.

Mengakhiri diskusi, Azis menyampaikan rasa terima kasihnya atas segala masukan-masukan yang sudah disampaikan. Selanjutnya, gagasan tersebut nantinya akan menjadi bahan dalam rapat-rapat selanjutnya di Dewan. “Yang menjadi catatan, tentang badan khusus penyehatan ekonomi tertuang dalam Perppu yakni KSSK yang terdiri dari Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS. Tetapi usulan soal badan khusus pemulihan ekonomi, ini akan coba kita *exercise* dalam diskusi-diskusi. Namun perlu kita sampaikan bahwa dalam pembahasan Perppu ini nantinya tidak memungkinkan adanya perubahan, karena sifatnya hanya akan disetujui atau tidak setuju dalam pengambilan keputusan Tingkat II,” pungkas legislator dapil Lampung II itu. ■ alw/sf

# Batasi Penyebaran Covid-19, Larangan Mudik Harus Segera Diumumkan

**A**nggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta Pemerintah segera mengumumkan larangan mudik untuk menekan laju penyebaran virus Corona (Covid-19). Fadli berharap Pemerintah tak lagi lambat melangkah ke keputusan-keputusan strategis selanjutnya yang memang diperlukan untuk meredam penyebaran Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.

Ia mengatakan, sejak 10 April 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menerapkan status Pembatasan

Sosial Berskala Besar (PSBB) diikuti beberapa daerah lain Bogor, Depok, Bekasi hingga Tangerang. Kendati dinilai terlambat karena kurangnya responsif Pemerintah pusat, namun penerapan status ini masih lebih baik daripada diibandingkan sebagaimana berlangsung lebih sebulan ini.

“Salah satu keputusan urgen yang perlu dikeluarkan pemerintah adalah larangan mudik. Saya heran, kenapa sejauh ini Pemerintah masih tarik ulur isu mudik ini. Masyarakat dibuat bingung oleh berbagai pernyataan yang saling bertentangan soal mudik oleh pejabat-pejabat pemerintah pusat,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya kepada *Parlementaria* Rabu (15/4).

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menyampaikan, kegiatan mudik memang telah menjadi tradisi turun-temurun. Tiap tahun, lebih dari 19 juta orang pulang kembali ke kampung halaman. Jumlah pemudik jauh lebih kolosal, dibanding peserta ibadah Haji yang diikuti total 2,4 juta orang.

Namun permasalahannya, otoritas keagamaan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, sudah melahirkan sejumlah fatwa tegas melarang atau membatasi ibadah-ibadah keagamaan yang diikuti jamaah dalam jumlah besar, namun larangan serupa belum juga muncul terkait soal mudik. “Pemerintah terkesan seperti enggan kehilangan muka dan popularitas jika mengambil keputusan tidak populer tersebut,” kritik Fadli kepada Pemerintah.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI itu menambahkan, meskipun sudah menjadi tradisi, mudik bukanlah

ibadah yang wajib dilakukan. Dan sementara ibadah-ibadah keagamaan wajib saja sudah menyesuaikan diri dengan kondisi kedaruratan, mestinya soal mudik ini lebih mudah dibatasi dan dikontrol Pemerintah. Syaratnya hanya butuh sikap tegas dari Pemerintah.

“Status PSBB, baik di DKI maupun daerah lainnya, saya kira tak akan banyak artinya jika larangan mudik tak segera diumumkan Pemerintah. Kita tak bisa membayangkan apa jadinya kalau terjadi ledakan jumlah orang terpapar Covid-19 di daerah-daerah. Mengingat kualitas fasilitas kesehatan di daerah belum sebaik di Jakarta, Bandung, Yogya, atau Surabaya. Itu sebabnya, larangan mudik harus segera diumumkan,” tegas Fadli.

Sekjen MUI bahkan sudah mengeluarkan pernyataan lebih tegas, mudik tahun ini di tengah pandemi adalah haram. Sejumlah MUI daerah juga sudah mengeluarkan fatwa larangan mudik. Demikian juga Muhammadiyah telah mengumumkan kalau tak mudik adalah sebetulnya jihad kemanusiaan.

“Artinya, lembaga-lembaga keagamaan sebenarnya sudah satu suara menanggapi kondisi darurat ini. Agak aneh malah Pemerintah tidak tegas dan terkesan menunda-nunda dan mengambangkan isu ini,” kritiknya.

Karenanya, Fadli berharap adanya larangan tegas Pemerintah terkait kegiatan mudik, sehingga pandemi ini dapat segera diatasi. “Mari bekerja sama, saling bahu-membahu untuk mengatasi krisis ini. Kepada pemerintah, keputusan dan kebijakan harus tepat dan cepat,” tandas Fadli. ■ *ann/es*



Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon. Foto: Andri/MAN

# Komisi II Setujui Penundaan Pilkada Jadi 9 Desember 2020

**K**omisi II DPR RI menyetujui usulan Pemerintah agar dilakukan penundaan terhadap pelaksanaan

Pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020. Persetujuan itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

“Komisi II DPR RI menyetujui usulan Pemerintah terhadap penundaan pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak tahun 2020 menjadi tanggal 9 Desember 2020,” ucap Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam rapat yang digelar secara virtual di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4).

”

**KOMISI II DPR RI  
MENYETUJUI USULAN  
PEMERINTAH TERHADAP  
PENUNDAAN  
PELAKSANAAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
PILKADA SERENTAK  
TAHUN 2020  
MENJADI TANGGAL  
9 DESEMBER 2020**

Sebelum dimulainya pelaksanaan lanjutan terhadap Pilkada serentak tahun 2020, tambah Ahmad Doli, Komisi II DPR RI bersama Mendagri dan KPU akan melaksanakan Rapat Kerja setelah masa tanggap darurat Covid-19 berakhir untuk membahas kondisi terakhir perkembangan penanganan pandemi Covid-19, sekaligus memperhatikan kesiapan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada serentak tahun 2020.

“Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan evaluasi terhadap keserentakan Pemilu pada tahun 2019, maka Komisi II DPR RI mengusulkan kepada pemerintah agar pelaksanaan Pilkada kembali disesuaikan dengan masa jabatan satu periode lima tahun yaitu di 2020, 2022, 2023, 2025 dan seterusnya yang nanti akan

menjadi bagian dalam Amandemen Pasal 201 UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk masuk ke dalam Perppu,” tandas politisi Partai Golkar itu menutup Raker dan RDP tersebut. ■ dep/sf



Ketua Komisi II DPR RI  
Ahmad Doli Kurnia  
Tandjung. Foto: Jaka/MAN



# Koordinasikan Secara Internal Aturan Ojol Selama PSBB

**W**akil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyarankan

agar para pemangku kepentingan dari Kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, bisa mengkoordinasikan aturan secara internal, agar kebijakan yang ditetapkan kepada ojek *online* (ojol) saat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) bisa seragam dan tidak membingungkan.

Pasalnya, aturan Kementerian Perhubungan mengizinkan pengemudi ojol mengangkut penumpang dalam kondisi tertentu, sedangkan aturan Kementerian Kesehatan justru melarang ojol mengangkut selain barang, ini menjadi dualisme interpretasi.

“Dengan begini, jadinya polisi bingung mau pakai aturan yang mana, rakyat juga makin bingung. Saya yakin sebenarnya para pemegang kebijakan ini punya pertimbangan positifnya masing-masing, namun hendaknya dalam membuat peraturan itu sudah dikoordinasikan secara internal, jadi infonya di masyarakat tidak simpang siur,” papar Sahroni dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Selasa (14/4).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menyampaikan, aparat penegak hukum, Kepolisian khususnya Direktorat Lalu Lintas bertugas untuk memastikan aturan dari pemerintah dapat diimplementasikan di masyarakat.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: Oji/MAN

”

**SEBENARNYA  
PARA PEMEGANG  
KEBIJAKAN INI PUNYA  
PERTIMBANGAN  
POSITIFNYA MASI  
Masing, namun  
hendaknya  
dalam membuat  
peraturan itu sudah  
dikoordinasikan  
secara internal,  
jadi infonya di  
masyarakat tidak  
simpang siur**

Namun menurutnya, jika aturannya masih belum seragam, maka hal ini hanya akan menyebabkan kesimpangsiuran di lapangan.

Sahroni mengingatkan bahwa dalam kondisi wabah Covid-19 seperti saat ini, para pemangku kebijakan sedianya bisa menahan diri dan fokus pada kemanusiaan, serta tidak mengutamakan ego sektoral masing-masing.

“Rakyat sangat menunggu kebijakan dari para pemangku kebijakan untuk membantu kesulitan mereka, bukan pada aturan yang tumpang tindih seminggu bikin rakyat makin bingung,” imbuh Sahroni. ■ eko/es

# Komisi IV Minta Ajuan Potongan Anggaran KLHK Dicek Ulang



Ketua Komisi IV DPR RI Sudin. Foto: Kresno/MAN

**K**etua Komisi IV DPR RI Sudin menilai rencana kebijakan pemotongan anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada APBN 2020 yang diajukan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dianggap kurang tepat. Menteri LHK menyampaikan rencana kebijakan pemotongan anggaran KLHK di beberapa sub bagian sehubungan untuk membantu Pemerintah dalam penanganan wabah virus Covid-19.

Terkait hal tersebut, Sudin yang memimpin Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK besar jajaran secara virtual, Rabu

(15/4), meminta agar dilakukan pengecekan ulang terhadap besaran potongan anggaran di masing-masing sub bagian itu, dengan mempertimbangkan urgensi dan dampak yang bisa ditimbulkan dari besaran potongan anggaran yang diajukan oleh Menteri LHK.

“Saya minta tolong dicek kembali sebelum nanti ada persetujuan anggaran yang akan disepakati bersama. Seharusnya ada beberapa hal yang jangan terlalu besar (potongan anggarannya). Misalnya inspektorat, ini sangat penting sekali, karena kita lihat dari pagu anggaran keseluruhan yang Rp 6 triliun, kalau pengawasnya cuma dapat Rp 66

miliar, bagaimana untuk biaya perjalanan dan lain-lainnya,” ucap Sudin dalam Raker itu.

Sudin menambahkan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan anggarannya dipotong sampai dengan Rp 88 miliar, berarti hampir 20 persen. Sementara terkait penegakan hukum, menurutnya pada saat ini orang akan berbuat kejahatan lingkungan maupun penembangan liar, penyerobotan lahan juga akan merajalela, karena biaya penegakan hukumnya cukup besar dipangkas.

“Seperti kesepakatan awal, seharusnya (anggaran itu) dipangkas kurang lebih sebanyak 10 persen,” tandasnya. Belum lagi (pemotongan anggaran) pada Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Beracun, lanjut politisi PDI-Perjuangan itu. Dikatakannya, saat ini limbah medis menjadi yang paling banyak. Seperti masker dan juga alat rapid tes yang tentunya otomatis menjadi limbah yang sangat berbahaya.

“Saya meminta agar hal ini diperhatikan. Termasuk juga anggaran Badan Restorasi Gambut (BRG), dari Rp 312 miliar, dipotongnya Rp 79 miliar. Kita pikirkan tidak lama lagi akan musim kemarau. Saya perhatikan BRG untuk pembuatan sekat kanal dan lain-lain ini dipotongnya cukup besar sekali. Sementara kalau kita lihat (anggaran) Kesetjenan, dari Rp 592 miliar dipotongnya hanya Rp 40 miliar,” tandas legislator dapil Lampung I itu. ■ dep/sf

# Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Pangan Selama PSBB

**A**nggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro mengatakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus mempersiapkan banyak aspek di daerah, terutama dalam hal ketersediaan pangan. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat menanggapi persetujuan PSBB oleh Pemerintah di daerah penyangga DKI Jakarta seperti Kota dan Kabupaten Bekasi, Kota dan Kabupaten Bogor, Kota Depok hingga Tangerang Raya.

“Pemerintah lokal harus menyiapkan dan menjamin kelancaran penyediaan kebutuhan hidup dasar seperti logistik pangan,” ujar Fauzi dalam rilis yang diterima *Parlementaria*, Selasa (14/4). Selain itu, menurut Fauzi juga perlu adanya persiapan layanan kesehatan, keamanan, anggaran dan operasionalisasi pengaman sosial dan kesiapan masyarakat untuk menerapkan PSBB dalam

keberlangsungan hidupnya.

Penerapan PSBB pun telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2020, kepala daerah pun diminta menyampaikan informasi tentang kesiapan daerah terkait ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat. Menurut politisi F-NasDem ini, dalam aturan PSBB yang dikeluarkan Kemenkes, tak dijelaskan detail ketersediaan logistik pangan seperti apa, namun secara umum sudah mengerti apa yang dimaksud logistik pangan.

Sebut saja berupa sembilan kebutuhan bahan pokok

(sembako) seperti beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam, daging ayam dan sapi, garam, susu termasuk ketersediaan sayur mayur dan lauk pauk lainnya. “Itu harus tersedia di pasaran maupun dipasok oleh Pemda ke rumah-rumah warga seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jakarta selama pelaksanaan PSBB,” tutur Fauzi lebih lanjut.

Legislatur dapil Sumatera Selatan I itu menilai langkah yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dalam penerapan PSBB di Jakarta sudah tepat, dari pembagian sembako ke rumah warga dengan memberdayakan perangkat RT-RW setempat. “Itu sangat membantu bagi masyarakat terutama kalangan menengah ke bawah, yang memang mengalami kesulitan ekonomi di masa-masa seperti sekarang,” tutup Fauzi. ■ hs/sf

Anggota Komisi IV DPR RI Fauzi H. Amro.  
Foto: Arief/MAN



# Syarif Abdullah Desak Kemenhub Tegas Larang Mudik

**W**akil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie mendesak

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tegas melarang masyarakat mudik khusus di Tahun 2020 ini. Untuk itu, Syarif mendorong Kemenhub menyiapkan sanksi tegas bagi warga yang kedapatan mudik keluar daerah. Terutama, bagi pemudik dari zona merah (red zone) atau episentrum Covid-19 yaitu wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

“Saya minta dari jajaran Kementerian Perhubungan menyikapi mudik secara jelas dan tegas. Seharusnya dari Kemenhub tidak

memberikan kelonggaran. Malah, seharusnya diperlukan ada sanksi untuk yang masih saja nekat mudik keluar daerah. Utamanya, bagi pemudik dari zona merah Covid-19, Jabodetabek,” ujar Syarif, dalam siaran persnya, baru-baru ini.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai NasDem ini menambahkan, jangan sampai terjadi transfer Covid-19 dari Jabodetabek yang merupakan *red zone* ke daerah-daerah akibat tidak adanya ketegasan larangan mudik. Terlebih lagi, Alat Pelindung Diri (APD)

”

**KALAU ORANG HANYA DIIMBAU, INI TENTU AKAN MEMAKAN WAKTU DAN EDUKASINYA LAMA. PERSOALAN SEKARANG KAN MENDESAK MEMUTUS RANTAI AGAR TIDAK TERJADI PERPINDAHAN**

untuk tenaga medis di sejumlah wilayah Indonesia masih sangat terbatas.

“Kalau orang hanya diimbau, ini tentu akan memakan waktu dan edukasinya lama. Persoalan sekarang kan mendesak memutus rantai agar tidak terjadi perpindahan. Virus Covid-19 ini kan sarannya kan orang, makanya diterapkan *physical distancing* itu. Saya kira, dari Kemenhub harus ada aturan jelas,” pungkas legislator dapil Kalimantan Barat I itu. ■ pun/es

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie.  
Foto: Arief/MAN



# Realokasi Anggaran Kemendag Harus Fokus **Stabilisasi Harga Pangan Pokok**



Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Azka/MAN

**A**nggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengatakan, sebaiknya ada realokasi anggaran sebesar Rp 1,5 triliun di Kementerian Perdagangan (Kemendag) agar dapat difokuskan pada stabilisasi harga pangan pokok. Sebab, keluhan dari para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sudah menumpuk, terutama yang bergerak di berbagai industri makanan dan minuman skala kecil, mengenai tidak terkendalinya harga bahan baku sebagai komponen utama pembuatan produk makanan minuman (mamin).

Hal tersebut ia sampaikan dalam rilisnya sesuai mengikuti Rapat Kerja virtual Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto beserta jajarannya pada Jumat (3/4). Politisi

Fraksi PKS ini mendorong ketegasan pemerintah melakukan penindakan kepada para industri nakal yang telah menyebabkan melonjaknya beberapa harga bahan baku di daerah.

“Keluhan para penggerak UKM ini banyak dari semakin tingginya harga bahan baku. Misal gula. Ketua-ketua UKM banyak mengirimkan pesan *WhatsApp* maupun secara langsung ketika bertemu, mereka sangat resah. Mestinya Pemerintah mampu melakukan penindakan terhadap pelaku usaha yang menimbun atau menetapkan harga di luar kewajaran terhadap komoditas bahan pokok,” kata Ketua Forum UMKM Sumatera Barat ini.

Nevi mengatakan, banyak izin impor yang dibuka hanya demi memperlancar

proses impor produk pangan seperti produk hortikultura dan gula. Namun pada kenyataannya, hingga saat ini produk-produk pangan masih tergolong tinggi harganya seperti bawang putih. Bahkan, lanjut dia, harga gula pasir yang seharusnya memiliki harga eceran tertinggi (HET) gula sebesar Rp. 12.500 per Kg, namun hingga kini di pasaran, masih banyak yg menjual sebesar Rp 19.000 per Kg lebih.

Legislator dapil Sumatera Barat Il ini mengatakan bahwa dengan adanya wabah Covid-19 saat ini sangat mempengaruhi aktivitas perdagangan yang ada di Indonesia, sehingga secara langsung mempengaruhi pelaku usaha dalam negeri dan perekonomian nasional. Ia berharap, adanya relokasi anggaran Rp 1,5 triliun di Kemendag, akan mampu memberi dampak stabilisasi harga pangan pokok.

“Saya meminta kepada Pemerintah, kondisi yang serba sulit ini agar tidak melupakan begitu saja perdagangan luar negeri (ekspor). Program penguatan produk yang berorientasi ekspor secara digital, promosi digital tetap dilakukan minimal bisa disiapkan agar ketika wabah Corona berakhir, kegiatan langsung berjalan secara lancar secara cepat,” pinta Nevi.

Selain persoalan bahan pokok, ia juga menyoroti persoalan jaminan kesehatan. Nevi meminta dibangun sistem jaminan atau prosedur legalitas dengan cara bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan bahwa tiap logistik yang berjalan mengangkut barang dan pelaku bebas dari virus Covid-19, sehingga pedagang di pasar yang menerima merasa aman menjual bahan pokok ke konsumen. ■ *er/es*

# LBM Eijkman Harus Aktif Meneliti Mutasi Virus SARS-CoV-2

Indonesia telah lebih dari satu bulan mengalami pandemi Covid-19. Namun sejauh ini belum meneliti dan mendaftarkan urutan genom virus pemicu Covid-19 ini. Sementara negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam telah lebih dulu melaporkannya. Anggota Komisi VII DPR RI Sulaiman Umar menekankan agar LBM Eijkman sebagai lembaga riset molekuler yang memiliki kualifikasi dan pengalaman panjang meneliti dan menangani beberapa kasus infeksi virus harus aktif meneliti mutasi virus SARS-CoV-2.

Ia mengatakan bahwa penelitian dan temuan adanya mutasi virus ini dan identifikasi tipenya sangat penting karena selain menemukan kecepatan mutasinya, juga berimplikasi secara klinis dan dalam hal pengembangan vaksin. Menurutnya, sejumlah petunjuk klinis yang diadopsi dari negara lain, seperti China, misalnya, tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi pasien Covid-19 di Indonesia.

“LBM (Lembaga Biologi Molekuler) Eijkman sebagai lembaga riset molekuler yang memiliki kualifikasi dan pengalaman panjang meneliti dan menangani beberapa

kasus infeksi virus seperti virus Flu Burung (HN51), virus West-Nile, virus Sika, bahkan identifikasi virus Corona lama sejauh ini telah banyak terlibat dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19, yaitu dalam hal tes virus SARS-CoV-2 dengan metode kombinasi Teknik PCR (polymerase chain reaction) dan sequencing, bahkan telah ditunjuk untuk memimpin konsorsium pengembangan vaksin,” ucap Sulaiman dalam keterangan persnya, Senin (13/4).

Ia menegaskan, untuk lebih mengoptimalkan peran dan kapasitas profesionalnya dalam percepatan penanggulangan Covid-19, ia meminta LBM Eijkman untuk juga terlibat aktif dalam kajian dan penelitian mutasi virus SARS-CoV-2 yang memicu Covid-19 yang hingga saat ini, Minggu (12/4/2020), telah menginfeksi 4241 orang di 33 provinsi, dan membawa korban 373 nyawa rakyat Indonesia.

Sulaiman memaparkan, virus baru SARS-CoV-2 yang memicu Covid-19 dan telah menewaskan 108.994 orang (12/4) di berbagai penjuru dunia ini ternyata terus bermutasi. Dikatakannya, identifikasi mutasi virus tersebut ditemukan pada bank data *Fred Hutchinson Cancer Research Center* di Seattle, yang menyediakan ribuan genom lengkap perkembangan virus yang tengah menyerang dunia. Sejauh ini sudah ditemukan tiga varian yang menyebar di berbagai negara, yaitu SARS-CoV-2 tipe A, tipe B, dan tipe C.

“Virus Tipe A merupakan tipe paling awal, yang melompat dari virus berinang di kelelawar ke manusia atau *zoonosis* yang diperoleh dari isolat virus Corona BatCoV-RaTG13 yang ditemukan di Provinsi Yunan, China. Lompatan ini diperkirakan telah terjadi sejak November 2019 atau lebih awal lagi,” terang legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Menariknya, sambung Sulaiman, analisis *strain* menunjukkan tipe A ternyata jarang ditemui di China. Virus tipe A ternyata lebih umum ditemukan di Australia dan AS, kecuali New York. Sebanyak dua pertiga sampel di AS memiliki tipe A.

“Sedangkan Virus tipe B merupakan hasil mutasi dari tipe A. China (Wuhan) episenter awal pandemi itu terutama diserang oleh SARS-CoV-2 tipe B ini, yang mulai beredar di akhir Desember 2020. Tipe B kemudian ditemukan di hampir semua sampel di negara Asia Timur lain, seperti Jepang dan Korea Selatan, yang menunjukkan kemudahan mereka menginfeksi dengan sistem kekebalan tubuh populasi di sana, sehingga virusnya tak perlu bermutasi lagi. Tipe B ini kemudian menyebar ke Eropa, selanjutnya ke New York,” jelas legislator dapil Kalsel II itu. ■ dep/es



Anggota Komisi VII DPR RI Sulaiman Umar Siddik.  
Foto: Dok/MAN

# Dana Calon Jemaah Haji Tidak Digunakan Untuk Penanganan Covid-19



Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: OJ/IMAN

**K**etua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto memastikan dana calon jemaah Haji tidak akan digunakan untuk penanganan virus Corona (Covid-19). Peralnya, lanjut Yandri, sempat beredar kabar bahwa dana yang sudah disetorkan calon jemaah Haji akan dipakai untuk membantu penanganan Covid-19. Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) ini meyakini berita tersebut tidak benar.

“Jika ibadah Haji batal, dana setoran Haji yang sudah disetorkan bapak-ibu calon jemaah Haji ke bank penerima sama sekali tidak akan diganggu satu rupiah pun,” pasti Yandri dalam rapat virtual Komisi VIII DPR RI dengan

Ditjen PHU Kementerian Agama dan BPKH, Rabu (15/4). Oleh karena itu, ia berharap agar calon jemaah Haji tidak risau atas dana yang sudah disetorkan. Karena semua akan dijamin keamanannya.

Meski demikian, ia menambahkan, jika nanti pelaksanaan ibadah Haji tahun ini gagal, maka dana Haji dari APBN 2020 yang sudah dipersiapkan untuk pelaksanaan Haji akan direalokasikan untuk penanganan Covid-19. “Jadi yang akan digeser atau direalokasikan untuk membantu penanganan Covid-19 adalah anggaran APBN yang sudah dianggarkan sebelumnya, sebesar Rp 325 miliar. Bukan dana yang

disetorkan calon jemaah Haji,” tegas Yandri sebagai penutup.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendesak Kemenag agar segera memutuskan pelaksanaan ibadah Haji tahun 2020. Ia meminta paling lambat pertengahan Ramadan mendatang, Pemerintah harus memutuskan Indonesia bisa memberangkatkan jemaah Haji. Menurutnya, keputusan itu tidak harus menunggu Kerajaan Saudi Arabia. Karena yang terpenting sebetulnya adalah kesiapan jemaah Haji.

Meski demikian, politikus Fraksi Partai Golkar itu mengingatkan, jika Haji tahun 2020 tetap dilaksanakan, Pemerintah harus bisa memastikan bahwa tidak akan ada risiko jemaah Haji Indonesia terinfeksi Covid-19. Oleh karenanya, ia berharap agar Kemenag memikirkan secara matang hal tersebut.

“Pemerintah harus siap memastikan mayoritas calon jemaah Haji yang telah mendaftar itu, pertama ia memang bebas Covid-19 untuk berangkat Haji. Yang kedua, mereka tidak berpotensi untuk tertular Covid-19 selama di Arab Saudi. Itu yang harus dipikirkan dengan matang,” pesan legislator dapil Jawa Barat II itu lebih lanjut.

Komisi VIII DPR RI sepakat untuk menjadikan hal tersebut menjadi salah satu kesimpulan dalam RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Komisi VIII DPR RI mendesak Pemerintah untuk segera menentukan batas waktu kepastian penyelenggaraan ibadah Haji tahun 1441/2020 Masehi dengan memperhatikan kondisi objektif penanganan wabah Covid-19 di dalam negeri dalam waktu secepatnya. ■ ayu/sf

# Legislator Apresiasi Langkah BPKH Antisipasi Pembatalan Haji 2020

**A**nggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengapresiasi kebijakan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama yang dengan cepat menyiapkan langkah antisipasi terbaik jika ibadah Haji tahun 2020 dibatalkan, akibat meluasnya wabah virus Corona (Covid-19) di Arab Saudi.

“Saya apresiasi sikap dari BPKH dan Dirjen PHU yang dengan siap menyiapkan langkah-langkah antisipasi jika tahun 2020 ini tidak ada penyelenggaraan ibadah Haji akibat virus Covid-19 di Arab Saudi,” ungkap Selly saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Kepala BPKH dan Dirjen PHU, Rabu (15/4).

Politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, BPKH sudah menyiapkan segala opsi termasuk yang terburuk apabila jemaah Haji tahun 2020 meminta pengembalian uang. “Salah satunya BPKH ini sudah menyiapkan langkah suatu opsi terburuk jika jemaah Haji tahun ini minta pengembalian uang,” imbuh Selly.

Lebih lanjut mantan Wakil Bupati Cirebon itu menyampaikan, seluruh pihak yang bertanggung jawab atas keberangkatan jemaah Haji termasuk BPKH dan Kemenag harus siap dan siaga menunggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah Haji tahun 2020 ini.



Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Avdriany Gantina. Foto: Andri/MAN

”

**BPKH DAN KEMENAG HARUS SIAP DAN SIAGA MENUNGGU KEPUTUSAN DARI PEMERINTAH ARAB SAUDI MENGENAI IBADAH HAJI TAHUN INI, KARENA DIBATALKAN ATAU TIDAKNYA BUKAN KEPUTUSAN DARI INDONESIA**

“BPKH dan Kemenag harus siap dan siaga menunggu keputusan dari Pemerintah Arab Saudi mengenai ibadah Haji tahun ini, karena dibatalkan atau tidaknya bukan keputusan dari Indonesia. Tetapi kita harus berharap masalah ini cepat selesai, sehingga ibadah Haji tahun ini tanpa masalah,” harap legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Seperti yang diketahui, di tengah situasi pandemi virus Corona saat ini, persiapan keberangkatan Haji tetap dilaksanakan. Sebanyak 156 hotel di Mekkah dan 28 hotel di Madinah telah siap menampung jemaah Haji asal Indonesia, termasuk kebutuhan konsumsi jemaah selama berada di tanah suci. ■ tn/sf



# Komisi IX Desak Kemenkes Tidak Realokasi Anggaran

**P**andemi virus Corona (Covid-19) masih melanda Indonesia. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk tidak merealokasi anggaran dan jika memungkinkan menambah anggaran pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Tuberculosis (TB) dalam APBN Tahun Anggaran 2020. Pemberantasan itu penyakit DBD dan TB itu mulai dari program pencegahan, penanganan hingga anggaran.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama jajaran Kementerian Kesehatan RI, seperti Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes; Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes; Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemenkes; hingga Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (14/4).

”

**KEMENKES HARUS MENJAMIN KETERSEDIAAN OBAT DBD DAN TB, TERMASUK TB MDR SERTA OBAT PROGRAM LAINNYA, DAN MEMASTIKAN AKSESNYA BAGI FASILITAS KESEHATAN DI SELURUH INDONESIA MELALUI KATALOG NASIONAL**

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.  
Foto: Anief/MAN



Menurut Melki, sapaan akrab politisi Partai Golkar itu, Pemerintah harus serius menanggulangi wabah DBD dan TB di tengah pandemi Covid-19. “Kemenkes harus menjamin ketersediaan obat DBD dan TB, termasuk TB MDR serta obat program lainnya, dan memastikan aksesnya bagi fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia melalui katalog nasional,” tegas Melki.

Selain itu, masih kata legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) itu, pihaknya juga mendesak Kemenkes untuk melakukan pemetaan kasus DBD dan TB serta melakukan intervensi khusus di daerah yang masuk kategori risiko tinggi Covid-19 untuk mencegah adanya DBD dan TB. ■ rnm/sf

# Hadapi Covid-19, Indonesia Masih Dibayangi DBD dan TB

**A**nggota Komisi IX DPR RI Putih Sari menyampaikan dukungannya kepada Pemerintah yang sedang fokus menangani penyebaran pandemi virus Corona (Covid-19). Namun selain Covid-19, ia mengingatkan bahwa saat ini Indonesia masih menjadi endemis Tuberkulosis (TB) dan harus memberantas Demam Berdarah Dengue (DBD). Indonesia menjadi negara ketiga kasus penderita TB tertinggi setelah China dan India.

“Intinya kami mendukung Pemerintah lebih intensif memberantas DBD dan TBC di tengah Pandemi Covid-19 ini,” ungkap Putih dalam RDP Komisi IX DPR RI dengan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dirjen Kesehatan Masyarakat, Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, serta Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI secara virtual, Selasa (15/4).

Selain membahas wabah DBD serta penanganan yang dilakukan dalam menghadapi wabah DBD saat ini, rapat tersebut juga membahas kondisi terkini TB di Indonesia serta penanganan yang dilakukan dalam mengendalikan TB untuk mencapai misi bebas TB Tahun 2030. Putih Sari menyampaikan penanganan penyakit menular TB

juga perlu diperhatikan meski di tengah merebaknya wabah Covid-19.

Pemerintah memang sibuk mengatasi Covid-19, namun jangan sampai abai dengan penyakit lainnya, seperti DBD dan TB yang juga menyebabkan tingginya angka kematian di Indonesia. Menurutnya, sebagian masyarakat masih kesulitan dalam mengakses obat sehingga alokasi anggaran untuk TB harus ditingkatkan. Selain itu, penguatan infrastruktur fasilitas pelayanan kesehatan juga diperlukan. Hal ini penting untuk menekan *Multidrug - Resistant Tuberculosis* dan TB laten yang sangat besar di tanah air.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, perlu sinergi lintas sektor dalam upaya promotif dan preventif untuk memerangi TBC. Ia juga mengingatkan agar rekomendasi WHO dan protokol kesehatan dipastikan tetap berjalan dengan baik, kendati di masa pandemi Covid-19. Putih juga mengusulkan agar pasien yang terduga terinfeksi Covid-19 namun hasil testnya negatif, agar melakukan juga pemeriksaan TB. Mengingat, kedua penyakit tersebut sama-sama menyerang penyakit pernapasan.

“Dalam rangka eliminasi TB, tentu dipikirkan bagaimana kalau ada yang terduga Covid-19 namun hasil testnya negatif, bisa dipastikan juga melakukan pemeriksaan TB karena sebagian gejala Covid dan TB ini kan sama. Saya kira juga perlu diasumsikan, penyintas TB salah satu yang beresiko tinggi terpapar Covid-19, sehingga mereka bisa diprioritaskan *screening* Covid atau *rapid test*. Intinya bagaimana promosi penyakit TBC ini bisa lebih intensif karena gejalanya sangat mirip, tetapi informasi di masyarakat masih kurang. Jadi, kami mendorong Kemenkes agar lebih masif mensosialisasikan penyakit TB di tengah Pandemi,” tandas Putih. ■ ann/sf

Anggota Komisi IX DPR RI  
Putih Sari. Foto: Jaka/MAN



# Pemerintah Harus **Beri Solusi** Kepada Tenaga Kerja yang di-PHK

**A**nggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mendorong Pemerintah segera memberikan solusi kepada para tenaga kerja yang mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan akibat lesunya perekonomian dikarenakan merebaknya wabah Covid-19. Menurut data yang ia miliki, sudah ada ribuan tenaga kerja yang dirumahkan tanpa upah, sehingga akan berdampak signifikan secara sosial ekonomi.

Dalam rilis yang diterima **Parlementaria**, baru-baru ini, Aliyah mengungkapkan bahwa sudah selayaknya paling tidak para karyawan tersebut diberikan *golden-shake hands* atau uang kompensasi sehingga mereka paling tidak dapat bertahan hidup menghadapi kondisi tidak pasti seperti ini. Tentunya apabila hal ini didiamkan saja menurutnya bisa menimbulkan gerakan sosial di kalangan bawah yang berpotensi timbulnya gejolak politik di kemudian hari.

"Data Disnakertrans DKI Jakarta merinci dari 9.096 perusahaan dengan 72.770 merumahkan pekerja/buruh; dan 2.008 perusahaan dengan 16.065 melakukan PHK pekerja/buruh. Hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat dan DKI untuk mendapat solusi yang cepat. Pendataan yang dilakukan oleh Disnakertrans DKI Jakarta untuk segera dilakukan dengan data yang valid dan transparan. Memastikan pelaksanaannya mencapai sasaran yang tepat," terangnya.

Politisi Partai Gerindra ini meminta Pemerintah menerapkan program Kartu Prakerja melalui pelatihan

keterampilan kerja sebagai program nasional dari Pemerintah Pusat. Terkait dengan wabah Covid-19 saat ini, maka ia mendorong pemerintah harus proaktif dan mencari solusi teknis tentang jenis pelatihan dan pendampingan sementara yang tepat dan dibutuhkan masyarakat.

"Terkait dengan wabah Covid-19, perlu dicari solusi teknis pelatihan dan pendampingannya. Saya meminta Disnakertrans DKI Jakarta untuk secara aktif memberikan perhatian, pendampingan dan informasi kepada masyarakat DKI Jakarta yang terkena dampak virus Corona ini. Dan memastikan tepat sasaran," jelasnya.

Politisi dapil DKI Jakarta II ini pun menyoroti dampak terjadinya wabah penyakit terhadap tenaga kerja perempuan yang memiliki tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Menurutnya sebagai buruh

yang menghidupi keluarga, seharusnya para perempuan ini dapat menjadi prioritas utama bagi Pemerintah untuk segera diberikan bantuan secara materiil agar mampu bertahan.

"Sekitar 70 persen pekerja perempuan di DKI Jakarta tentu terkena dan mereka bertanggung jawab atas kelangsungan rumah tangga, termasuk kesehatan anggota keluarganya, ditambah penghasilan yang menurun akibat wabah penyakit dan di-PHK adalah kombinasi fatal pemukul daya beli yang menjadi persoalan ekonomi keluarga," jelasnya. ■ er/es

Anggota Komisi IX DPR RI  
Himmatul Aliyah.  
Foto: Andri/MAN



# Gubernur BI Harus Pastikan Cadangan Devisa Cukup Recovery Krisis Covid-19

**W**akil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga mengatakan, berdasarkan sejumlah data puncak penyebaran pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) masih akan terjadi pada Mei hingga Juni 2020 mendatang. Dampaknya secara ekonomi, diperkirakan hingga September kegiatan ekonomi baru dapat bergerak kembali dan baru akan mulai normal pada tahun depan, jika memakai *best case scenario*.

“Kalau kita hitung sekarang, kekuatan masyarakat sudah mulai melemah, tetapi memang belum mencapai *peak*-nya, yang akan dimulai pada Bulan Mei. Kalau kita lihat 3 bulan ke depan ini akan menjadi masalah, ditambah perlu 3 bulan untuk *recovery* dari Covid-19, tentu bisnis juga. Sehingga baru tahun depan ekonomi berjalan normal,” kata Eriko dalam Rapat Kerja secara virtual Komisi XI DPR RI dengan Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, Rabu (8/4).

Berdasarkan perkiraan tersebut, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai bahwa cadangan devisa nasional yang pada akhir Maret tersisa sebesar 121 miliar dollar AS, yang sempat turun 9,4 miliar dollar AS dari bulan sebelumnya, dapat mencukupi untuk 7 hingga 9 bulan ke depan. Tetapi, ia mempertanyakan kemungkinan Bank Indonesia menggunakan setengah dari cadangan devisa untuk membantu perekonomian saat ini.

Menurut Eriko, kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi adalah 3 hingga 4 bulan impor, yang ditaksir senilai setengah dari cadangan devisa saat



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga. Foto: Arief/MAN

ini yang sebesar 121 miliar dollar AS. Ia menghitung, setidaknya ada 60 miliar dollar AS yang bisa digunakan BI untuk mengintervensi dan melakukan hal-hal yang dibutuhkan negara dalam situasi *force majeure* ini.

Sementara itu, kebutuhan nasional dalam menghadapi wabah virus Covid-19 hingga akhir tahun mencapai kisaran Rp 2.500 triliun hingga Rp 2.600 triliun. “Berarti ada defisit, ada kekurangan sekitar Rp 1.100 triliun, ini lantas bagaimana. Apakah dengan cadangan devisa 121 miliar dollar AS yang hanya bisa dipergunakan setengahnya, apakah ini memungkinkan,” tanya legislator dari DKI Jakarta II itu.

Eriko mengusulkan agar hal ini dihitung dengan cermat dan perlu dilakukan *stress test* karena

membutuhkan waktu yang cukup untuk kegiatan ekonomi kembali pulih. Menurutnya, harus ada *level of confidence* dari Pemerintah. Jika tidak memungkinkan, ia mempertanyakan seperti apa bentuk jalan keluar yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk menenangkan pasar.

“(Kondisi) Ini bisa sampai akhir tahun. Kalau tidak segera dilakukan hal yang mendasar akan bisa mundur lagi puncaknya, bisa sampai tahun depan ekonomi baru mulai bergerak kembali. Dengan Perppu yang baru, peran Kemenkeu, BI, dan OJK menjadi sentral dan saat ini menjadi yang bisa diharapkan, karena perekonomian sangat bergantung pada institusi-institusi terpenting saat ini,” tegas Eriko menutup pernyataannya. ■ alw/sf

# Rupiah Stabil saat Wabah Covid-19, BI Diapresiasi



Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir. Foto: Andri/MAN

**B**ank Indonesia (BI) mendapat apresiasi karena mampu menstabilkan kurs rupiah di tengah wabah Covid 19. Pada penutupan Senin (13/4), rupiah berada di level Rp 15.630 per dollar AS. Di samping itu, perbankan nasional juga tak terpancing melakukan sesuatu yang melemahkan rupiah.

Apresiasi ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Achmad Hafisz Tohir dalam rilis persnya, Selasa (13/4). "BI berhasil melakukan *Repo Line Credit* kepada The Fed Bank sebesar 60 billion dollar Amerika Serikat (AS) (separuh cadangan devisa RI) sehingga pasar cukup *confidence* terhadap ketersediaan moneter di dalam negeri," ungkap Hafisz.

”

**MENAHAN DIRI DAN TAK TERPANCING MELAKUKAN PERDAGANGAN YANG MEMUNGKINKAN TERJADINYA PELEMAHAN TERHADAP RUPIAH. INI PENTING AGAR EKONOMI NEGARA TIDAK GOYAH KARENA ADA PELEMAHAN PEREKONOMIAN GLOBAL DAN NASIONAL MENYUSUL VIRUS CORONA YANG MEWABAH DI TANAH AIR**

Wakil Ketua F-PAN DPR RI itu, juga menambahkan, BI dengan cepat pula menutup pelemahan cadangan devisa melalui penerbitan surat utang global pemerintah, yang sempat anjlok dari 130 billion dollar AS menjadi 121 billion dollar AS. "Dan kini stabil kembali di kisaran 126 bilion dollar AS dan akan bertambah lagi dalam waktu dekat untuk memberikan kepercayaan kepada pasar," ungkap legislator dapil Sumsel itu .

Sementara perbankan nasional yang diapresiasi Hafisz adalah menahan diri dan tak terpancing melakukan perdagangan yang memungkinkan terjadinya pelemahan terhadap rupiah. Ini penting agar ekonomi negara tidak goyah karena ada pelemahan perekonomian global dan nasional menyusul virus Corona yang mewabah di Tanah Air. ■mh/es

# Pemerintah Didorong Perbaiki Draf RUU Ciptaker

**W**akil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta Pemerintah untuk memperbaiki draf Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang ada saat ini, karena menurutnya draf tersebut dibuat sebelum adanya pandemi Covid-19 menyerang Indonesia.

Hal tersebut ia utarakan saat Baleg DPR RI melakukan rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum dan HAM membahas persetujuan pembahasan RUU Ciptaker di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4). Menurutny masih ada

beberapa pasal yang janggal dan tidak bisa langsung disetujui begitu saja, sehingga pembahasan RUU Ciptaker ini sebaiknya tidak dilakukan secara terburu-buru.

“Draf ini kalau tidak salah dibuat sebelum adanya Covid-19, sehingga dalam proses kita menyerap aspirasi dari publik baik kiranya kita juga memberi kesempatan kepada pemerintah manakala mau menarik drafnya atau memperbaiki draf yang ada,” ujar politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Menurut Rieke dalam pembuatan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sesuai kesepakatan rapat, dirinya mengaku butuh mendengarkan

masukan dari publik secara mendalam. Sehingga menurutnya waktu yang dibutuhkan Anggota dalam menyusun DIM, bisa dimanfaatkan juga oleh Pemerintah untuk melakukan perbaikan.

“Sehingga ini perlu di *check and recheck* secara lebih mendalam lagi. Saya yakin pembentukan panja ini bukan berarti otomatis DIM ada, otomatis pembahasan terjadi. Jujur saja kami harus melakukan pembahasan pendalaman untuk bisa menyerahkan DIM dan kami memberikan waktu kepada pemerintah barangkali ada perbaikan,” jelas Rieke. ■er/es



Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rieke Diah Pitaloka (kanan). Foto: Azka/MAN

# Timwas DPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Perbanyak Rapid Test



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. Foto: Andri/MAN

**T**im Pengawas (Timwas) Penanggulangan Bencana DPR RI menggelar rapat secara virtual dengan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Letjen TNI Doni Monardo membahas 'Implikasi Koordinasi Upaya Penanggulangan Pandemi Covid-19', Kamis (16/4). Pada rapat itu, Wakil Ketua DPR RI selaku Ketua Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk mempercepat dan memperbanyak *rapid test* atau PCR test.

Tujuannya, agar dapat dipetakan jumlah pengidap Covid-19 dan mengisolasi pasien yang positif Covid-19, sehingga dapat memutus rantai penyebaran Covid-19. Tak hanya itu, Ketua Gugus Tugas Percepatan

Penanganan Covid-19 juga diusulkan untuk melibatkan partisipasi rumah sakit-rumah sakit swasta dalam rangka menampung besarnya jumlah pengidap Covid-19. Serta, memastikan paramedis menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar WHO.

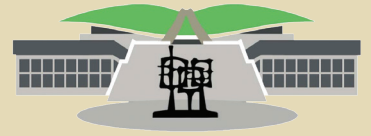
Lebih lanjut, Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI mengimbau Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah. Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI berpandangan, peningkatan koordinasi tersebut penting segera dilaksanakan guna memastikan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dapat berjalan terpadu dan diikuti oleh Pemerintah Daerah.

Di sisi lain, Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI mengingatkan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk memastikan masyarakat yang rentan dan terdampak oleh kebijakan penanggulangan Covid-19 mendapatkan kompensasi yang cepat menjelang datangnya bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 H.

Tak kalah pentingnya, Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI menyerukan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 untuk terus mendorong semua elemen bangsa mulai dari pemuka masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi masyarakat serta lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk melakukan sosialisasi hidup sehat. Serta, menerapkan protokol kesehatan WHO dan memberikan pencerahan kepada masyarakat yang menolak pemakaman penderita Covid-19.

Terakhir, dalam rangka menuntaskan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Anggota Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 diminta untuk menyampaikan jawaban tertulis terhadap pertanyaan yang belum terjawab dan informasi-informasi yang perlu disampaikan kepada Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI.

Rapat yang digelar virtual itu juga diikuti oleh sejumlah Anggota DPR RI yang tergabung dalam Timwas Penanggulangan Bencana DPR RI, di antaranya Mufti Anam, Sadarestuwati, Diah Pitaloka, dan Selly Andriany Gantina dari F-PDI Perjuangan, Hamka B. Kady dan Dewi Asmara dari F-Golkar, Sodik Mudjahid (F-Gerindra), Lisdia Hendrajoni (F-NasDem), Cucun Ahmad Syamsurijal (F-PKB), Nurhayati Monoarfa (F-PPP), Ali Taher (F-PAN) dan Guntur Sasono (F-Demokrat). ■ pun/sf



Satgas Lawan Covid-19 yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta Wakil Ketua DPR RI Korpolkam M. Azis Syamsuddin dan sejumlah Anggota DPR RI memberikan bantuan obat-obatan dan APD kepada tenaga medis di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Selasa (14/4). Foto: Yoga/MAN



Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Hukum dan HAM, dengan agenda pembahasan RUU Cipta Kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4). Foto: Azka/Od

